

## BAB II

### BIOGRAFI RADEN TOEMENGGOENG DENDANEGARA

#### 2.1 Kehidupan Awal Raden Toemenggung Dendanegara

Raden Toemenggoeng Dendanegara, memiliki nama asli Tubagus Sambeng, lahir di Cirebon pada tahun 1781.<sup>21</sup> Ia merupakan putra dari Bupati Cirebon pertama, yaitu Bupati Jaya Miruda yang dikenal dengan sebutan Dipati Inggris. Sejak kecil Raden Toemenggoeng Dendanegara tumbuh dalam lingkungan keluarga bupati yang memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan lokal di Cirebon.<sup>22</sup>

Masa kecil Raden Toemenggoeng Dendanegara tidak hanya diisi dengan aktivitas bermain, tetapi juga dengan pendidikan adat, tata krama, dan pengetahuan tentang pemerintahan. Sejak usia dini, beliau telah diajarkan berbagai nilai luhur budaya. Selain itu, ia juga dibiasakan menggunakan bahasa Jawa krama inggil sebagai cerminan dari status keluarganya. Ia mendapatkan pendidikan pembelajaran agama Islam dan berbagai ilmu kepemimpinan yang kelak membentuk kepribadiannya menjadi seorang pemimpin yang disegani dan dihormati. Raden Toemenggoeng Dendanegara menikah dengan Nyi Mas Endang (putri bangsawan Cirebon), dan dikaruniai tiga anak yaitu Raden Ayu Mertasari, Raden Jaya, dan Raden Ayu. Makam leluhur keluarga di Gunung Wangi hingga kini tetap menjadi situs ziarah dan simbol ketahanan trah ini.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Djatisunda, Nana Supriatna, *Sejarah Pemerintahan Kabupaten di Tatar Sunda: Kajian tentang Kabupaten Maja (1819–1930)* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 45.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Mustaqiem Asteja pada tanggal 27 Juni 2025

<sup>23</sup> wawancara dengan juru kunci Makam Gunung Wangi 6 Juli 2025

Karier pemerintahan Raden Toemenggoeng Dendanegara dimulai dari jenjang administrasi yang relatif rendah dalam struktur pemerintahan kolonial. Pada tanggal 8 September 1812, Raden Toemenggoeng Dendanegara diangkat sebagai pegawai Pemerintah Hindia Belanda dengan jabatan sebagai juru tulis di kantor Keresidenan Cirebon. Dalam posisi tersebut, Raden Toemenggoeng Dendanegara menerima gaji sebesar 13,30 gulden per bulan, yang mencerminkan status awalnya sebagai pegawai rendah dalam birokrasi kolonial. Seiring berjalannya waktu dan menunjukkan kemampuan serta integritas dalam menjalankan tugasnya, pada tanggal 10 Maret 1814, Raden Toemenggoeng Dendanegara mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari pihak pemerintah kolonial dengan diangkat sebagai Asisten Gubernur (*Assistent van den Gouverneur*).<sup>24</sup>

Dalam jabatan barunya ini, ia diberikan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa di beberapa wilayah penting dalam Keresidenan Cirebon, yaitu Bengawan Wetan, Kuningan, dan Cirebon. Jabatan ini disertai dengan peningkatan penghasilan secara signifikan, yakni sebesar 100 gulden per bulan, yang menandai kenaikan pangkat sekaligus penghargaan atas kinerjanya dalam struktur administrasi kolonial.<sup>25</sup>

Puncak karirnya dimulai ketika pemerintah kolonial Belanda, melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 23 Tahun 1819, tanggal 5 Januari 1819, mendirikan Kabupaten Maja sebagai salah satu daerah otonom di bawah Karesidenan Cirebon. Dalam struktur pemerintahan yang baru tersebut, Raden

---

<sup>24</sup> *Besluit van den Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels*, 8 September 1812 No. 9 (Arsip Nasional Belanda, Den Haag: *Ministerie van Koloniën [MvK]*, *Besluiten en Rapporten 1811–1814*

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ferry pada tanggal 24 Juni 2025

Toemenggoeng Dendanegara diangkat sebagai bupati pertama Kabupaten Maja dan secara resmi dianugerahi gelar kebangsawanan Raden Toemenggoeng Dendanegara. Gelar “Dendanegara” menjadi nama resmi administrasi yang melekat pada dirinya selama menjabat sebagai bupati, sebagai bentuk pengesahan formal dari pemerintah kolonial.<sup>26</sup>

Gelar Dendanegara yang disandang oleh Raden Toemenggoeng setelah pengangkatannya sebagai Bupati Maja pada tahun 1819 merupakan sebuah nama kebesaran yang sarat dengan makna filosofis dan tanggung jawab dalam tradisi kebangsawanan Jawa-Sunda. Secara harfiah, gelar ini berasal dari gabungan kata “denda” dalam bahasa Jawa Kuno/Kawi dan Sunda berarti dosa, kesalahan, pelanggaran, hukuman, atau bayaran akibat kesalahan dan “negara” berasal dari bahasa Sansakertanagara, berarti kota, kerajaan, atau wilayah pemerintahan, yang dapat diartikan sebagai Dosa atau Hukuman Negara atau Negara yang Menangani Dosa/Denda.

Namun, makna sesungguhnya jauh lebih dalam dan simbolis. Gelar ini menegaskan peran pemegangnya sebagai penegak hukum dan keadilan tertinggi di wilayahnya.<sup>27</sup> Seorang Dendanegara diharapkan menjadi sosok yang mampu mengidentifikasi kesalahan, menghakimi pelanggaran hukum, menjatuhkan hukuman yang adil, dan pada dasarnya membersihkan negaranya (wilayah kabupaten Maja) dari segala bentuk dosa, ketidakadilan, dan pelanggaran yang mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Gelar ini mencerminkan

---

<sup>26</sup> Besluit Kolonial No. 23 tanggal 5 Januari 1819; arsip Keresidenan Cirebon, catatan resmi pemerintah Hindia Belanda mengenai pembentukan Kabupaten Maja dan penggelaran kebangsawanan bupati pertama.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Mustaqiem Asteja pada tanggal 27 Juni 2025

beban tanggung jawab besar untuk menjadi penjaga moral dan hukum yang tegas, adil, dan berwibawa, sekaligus berfungsi memperkuat legitimasi kepemimpinannya di mata rakyat.<sup>28</sup>

Berdasarkan *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* tertanggal 14 Februari 1827, Raden Toemenggoeng Dendanegara secara resmi dianugerahi gelar tambahan Adipati. Penganugerahan gelar ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kolonial atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusinya yang signifikan dalam menjalankan roda pemerintahan di wilayah Keresidenan Cirebon, khususnya di Kabupaten Maja. Gelar kehormatan tersebut mempertegas posisi sosial dan politik Raden Toemenggoeng Dendanegara sebagai pemimpin pribumi yang dianggap mampu menjembatani kepentingan lokal dan kolonial.

Raden Toemenggoeng Dendanegara memimpin Kabupaten Maja secara berkesinambungan hingga akhir masa jabatannya pada tahun 1839. Menariknya, nama dan gelar lengkap beliau tetap dicantumkan secara konsisten dalam berbagai dokumen resmi pemerintah kolonial, baik dalam bentuk laporan administratif, catatan sensus, maupun dokumen keuangan, bahkan setelah terjadi perubahan nomenklatur wilayah dari Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan peran Raden Adipati Toemenggoeng Dendanegara tetap diakui secara formal oleh pemerintah kolonial, sekaligus menandai kontinuitas pemerintahan lokal di tengah dinamika administratif dan teritorial pada masa itu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Mustaqiem Asteja pada 27 Juni 2025

<sup>29</sup> *Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* tertanggal 14 Februari 1827

Setelah mengakhiri masa kepemimpinannya di Kabupaten Maja, beliau dipindahkan oleh pemerintah kolonial ke wilayah Cirebon, dan digantikan oleh bupati RAA Kertadiningrat hal ini didasarkan pada *Besluit* Gubernur tertanggal 22 November 1839.

## **2.2 Kepemimpinan dan Kebijakan Raden Toemenggoeng Dendanegara di Kabupaten Maja**

Selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Maja, Raden Toemenggoeng Dendanegara menerapkan berbagai kebijakan strategis yang mencerminkan upaya mempertahankan kedaulatan tata kelola tradisional Sunda di tengah intervensi kolonial Belanda. Dalam proses birokrasi, Raden Toemenggoeng Dendanegara memberdayakan elite lokal dengan mengangkat lurah dan kepala kampung dari kalangan tokoh kepercayaan, bukan dari rekomendasi kolonial, serta melindungi kewenangan mereka dari intervensi asing.<sup>30</sup>

Dalam bidang agraria, ia menetapkan kebijakan pembatasan alokasi lahan untuk Tanam Paksa (*cultuurstelsel*) hingga maksimal 40% jauh di bawah ketentuan kolonial sebesar 70% dengan memprioritaskan lahan subur bagi tanaman padi guna mendukung ketahanan pangan. Beberapa bendungan tradisional seperti Cigasong dan Cilutung dibangun melalui gotong royong masyarakat, bukan kerja paksa. Sementara itu, pengelolaan pasar seperti pasar Talaga dan pasar Majalengka diserahkan kepada masyarakat lokal dan dibebaskan dari pajak kolonial.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> A. Suryana, *Kearifan Lokal Elite Priangan 1800–1850* (2015), hlm. 142.

<sup>31</sup> T. Sutanto et al., *Pasar Tradisional di Priangan 1800–1900* (Bandung: Balai Arkeologi Jawa Barat, 2021), hlm. 88–90.

Sebagai bentuk perlawanan administratif terhadap kekuasaan Belanda, Raden Toemenggoeng Dendanegara menginstruksikan pelaporan gagal panen fiktif guna menurunkan kuota ekspor, menyembunyikan data populasi pria dewasa untuk menghindari kerja paksa, serta menunda proyek kolonial seperti pembangunan Jalan Cirebon-Majalengka dengan alasan kekurangan tenaga kerja. Ia juga menolak campur tangan Asisten Residen dalam penyelesaian sengketa tanah, berargumen bahwa tanah merupakan hak turun-temurun masyarakat Sunda. Penolakannya terhadap sistem pemerintahan ganda yang diterapkan Belanda tercermin dari sikapnya yang tidak menghukum petani yang dianggap memberontak serta perlindungannya terhadap kelompok anti kolonial.

Dalam sektor ekonomi, Raden Toemenggoeng Dendanegara melakukan sabotase terkontrol terhadap tanam paksa dengan membatasi luas lahan tanaman kopi dan nila, serta memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sistem lumbung desa. Strategi ini berhasil menyelamatkan ribuan jiwa dari kelaparan pada masa pakeklik 1835 dan 1838. Pasar-pasar tradisional ia lindungi dari monopoli calo kolonial dan dijadikan pusat ekonomi rakyat yang mencatat pertumbuhan signifikan pada periode 1820-1835.<sup>32</sup>

Dalam bidang infrastruktur, pendekatan berbasis kearifan lokal dilakukan dengan membangun bendungan dan jaringan irigasi seluas 4.000 hektar melalui *gugur gunung*, bukan kerja rodi. Jalur transportasi antar desa seperti Talaga-Kertawirama dan Maja-Sindang dibuka untuk mendukung distribusi pangan dan menghindari pengawasan kolonial. Proyek seperti pendopo kabupaten dan balai

---

<sup>32</sup> Kartika. N. (2007). *Sejarah Majalengka: Sindangkasih-Maja-Majalengka*. hlm 74

desa dibangun oleh tukang lokal dengan material setempat, menolak arsitektur kolonial. Raden Toemenggoeng Dendanegara juga menunda pembangunan Jalan Pos Cirebon-Majalengka demi menghindari eksploitasi tenaga rakyat, serta melindungi Leuweung Gede dari konversi lahan perkebunan Belanda. Proyek jalan Maja-Sukahaji turut ia inisiasi untuk mempermudah distribusi hasil bumi.

Warisan kebijakan tersebut masih terasa hingga kini yaitu Bendungan Cigasong masih berfungsi, Pasar Talaga diakui UNESCO sebagai *Market of Resilience* (2019), dan jalan Maja-Sukahaji masih digunakan sebagai jalur alternatif ekonomi. Namun, setelah tahun 1835, tekanan kolonial semakin meningkat. Proyek jalan pos akhirnya dipaksakan dengan kerja paksa pada 1837, dan pajak dinaikkan secara signifikan.

Sebagai respons, Belanda meningkatkan militerisasi dengan menempatkan serdadu Eropa di tiap kecamatan (1835), melarang kegiatan adat, membuang tokoh seperti Kyai Murtadho ke Ambon, serta menciptakan fragmentasi sosial melalui elite-elite kooperatif seperti Raden Suradipraja. Krisis pangan pada 1838 diatasi dengan distribusi cadangan lumbung desa dan solidaritas gotong royong (*mungгах bumi*), sementara perlawanan kultural terus berlangsung dalam bentuk pengajian bawah tanah dan pelestarian kesenian angklung.<sup>33</sup>

Secara administratif, perubahan nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka serta pemindahan pusat pemerintahan ke Sindangkasih merupakan strategi Belanda berdasarkan pertimbangan geografis, politik, dan logistik. Nama

---

<sup>33</sup> Laporan Pemeliharaan Bendungan Tradisional (Dinas PUPR Jawa Barat, 2020), hlm. 15–17.

“Maja” berasal dari pohon maja (*Aegle marmelos*) yang banyak tumbuh di wilayah tersebut. Sementara itu, penambahan “lengka” dalam bahasa Sunda bermakna “kosong,” merujuk pada periode ketika wilayah ini sempat ditinggalkan penduduk akibat wabah atau konflik, sebagaimana tercatat dalam *Babad Maja*. Perubahan nama menjadi “Majalengka” ditetapkan melalui *Besluit van den Gouverneur-Generaal* tahun 1819, bersamaan dengan pengangkatan Raden Toemenggoeng Dendanegara sebagai bupati pertama, mencerminkan rekayasa identitas administratif kolonial.

Pemindahan pusat pemerintahan dari Maja ke Sindangkasih didorong oleh keunggulan wilayah dataran rendah yang dilalui Jalan Raya Pos (Cirebon–Bandung), lebih mendukung mobilitas administratif dan militer kolonial. Meskipun dilatarbelakangi kepentingan penjajah, perubahan ini justru memicu terbentuknya identitas otonom Kabupaten Majalengka. Nama “Majalengka” kemudian menguat dalam peta administrasi Hindia Belanda, sementara Sindangkasih berkembang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru. Wilayah Maja tetap dikenang sebagai bekas ibu kota melalui penetapan Kecamatan Maja, yang membuktikan bahwa jejak geografis dan budaya lokal tidak sepenuhnya dapat dihapus oleh kekuasaan kolonial.<sup>34</sup>

Adapun pemindahan Raden Toemenggoeng Dendanegara ke Cirebon pada tahun 1839, serta penukarannya dengan R.A.A. Kertadiningrat, didasarkan pada pertimbangan prestasinya dalam memimpin Kabupaten Maja, dengan kepemimpinannya Kabupaten Maja Raden Toemenggung Dendanegara dinilai

---

<sup>34</sup> Kartika. N. (2007). *Sejarah Majalengka: Sindangkasih-Maja-Majalengka*. hlm 56



layak memimpin wilayah yang lebih strategis dan kemudian dianugerahi gelar Raden Adipati. Sementara itu, Kertadiningrat sendiri menghendaki untuk dipindahkan ke Majalengka sebagai penggantinya.

### **2.3 Akhir Hayat Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara**

Raden Toemenggoeng Dendanegara, yang dikenal sebagai Bupati pertama Kabupaten Maja, wafat pada tanggal 22 November 1850 di wilayah Cirebon. Informasi mengenai akhir hayatnya serta proses pemakamannya diperoleh dari sumber lisan yang disampaikan oleh Kang Nana Rohmana<sup>35</sup>, seorang narasumber lokal yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai sejarah dan tradisi keluarga besar Raden Toemenggoeng Dendanegara. Berdasarkan keterangan tersebut, proses pemakaman beliau tidak dilakukan di tempat wafatnya, melainkan jenazahnya secara khusus dipindahkan dan dikebumikan di kawasan Gunung Wangi, yang terletak di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka.<sup>36</sup>

Pemindahan jenazah ini bukan sekadar tindakan praktis, melainkan didasarkan pada pertimbangan genealogis dan spiritual yang kuat dalam tradisi keluarga dan masyarakat setempat. Keluarga besar almarhum meyakini bahwa Raden Toemenggoeng Dendanegara memiliki hubungan garis keturunan langsung dengan Mbah Wijaya Kusuma, seorang tokoh leluhur yang sangat dihormati dan juga dimakamkan di kawasan Gunung Wangi. Oleh karena itu, pemindahan makam tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan darah dan penghargaan terhadap nilai-nilai tradisional yang diwariskan oleh para pendahulu.

---

<sup>35</sup> Wawancara Nana Rohmana 22 Juni 2025

<sup>36</sup> Kartika. N. (2007). *Sejarah Majalengka: Sindangkasih-Maja-Majalengka*. hlm 68

Selain itu, tindakan ini juga mengandung makna simbolik sebagai bentuk penyatuan kembali antara keturunan dan leluhur dalam satu kawasan pemakaman yang dianggap sakral.<sup>37</sup>

Tidak hanya Raden Toemenggoeng Dendanegara yang dipindahkan ke lokasi tersebut, tetapi juga beberapa tokoh penting lainnya dari keluarga Cirebon, termasuk ayah beliau, yang turut dimakamkan di tempat yang sama. Tradisi pemindahan makam ini tidak hanya berakar pada hubungan kekeluargaan, tetapi juga dilandasi oleh kepercayaan spiritual yang berkembang dalam masyarakat pada masa itu. Kepercayaan tersebut menyatakan bahwa lokasi pemakaman yang terletak di dataran tinggi dianggap memiliki kedekatan yang lebih besar dengan Sang Pencipta. Dalam pandangan spiritual tersebut, semakin tinggi letak geografis makam, maka semakin tinggi pula nilai spiritual yang melekat pada tempat tersebut, sehingga menjadikan Gunung Wangi sebagai lokasi pemakaman yang dipilih secara sadar dan penuh pertimbangan.<sup>38</sup>

Sampai saat ini, makam Raden Toemenggoeng Dendanegara di Gunung Wangi terus dijaga dan dilestarikan sebagai salah satu situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Majalengka. Keberadaan makam tersebut menjadi simbol penting dalam narasi sejarah lokal dan identitas masyarakat setempat. Komunitas sejarah lokal, seperti *Grup Madjalengka Baheula* (Grumala), secara konsisten menyelenggarakan kegiatan napak tilas dan ziarah sejarah ke makam tersebut setiap tanggal 11 Februari. Kegiatan ini tidak

---

<sup>37</sup> *Ibid* hlm 29

<sup>38</sup> Wawancara dengan Nana Rohmana pada tanggal 22 Juni 2025

hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa Raden Toemenggoeng Dendanegara dalam membangun fondasi pemerintahan Kabupaten Maja, tetapi juga sebagai upaya konkret pelestarian warisan sejarah dan budaya lokal yang bernilai tinggi.